BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Merujuk studi yang sudah dihasilkan ini, ditemukan bahwa:

1. Konflik norma antara UU No 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan dan UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menciptakan ketidakpastian terkait pengaturan perkawinan dengan agama berbeda di Indonesia. UU No. 1 Tahun 1974 tidak secara spesifik mengatur perkawinan beda agama, dengan demikian memicu isu hukum terkait legalitas dan prosedur pelaksanaannya.
2. Secara garis besar Hakim mengabulkan permohonan berdasarkan argumentasi berikut; **Pengakuan HAM**, Hak untuk menikah dan membentuk keluarga adalah hak dasar yang harus dihormati, sebagaimana diatur dalam Pasal 28B UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999. **Fleksibilitas Hukum Adat**, dalam penjelasan UU No. 1 Tahun 1974, hukum perkawinan adat dapat diterapkan dalam kasus tertentu, terutama bila pihak-pihak sepakat untuk menundukkan diri kepada hukum adat atau hukum agama lain. **Prosedur Administratif**, Hakim merujuk pada UU No. 23 Tahun 2006 untuk memastikan pencatatan pernikahan dilakukan sesuai prosedur, sehingga sah di mata hukum negara.

Namun, keputusan ini meninggalkan pertanyaan mengenai status agama Pemohon II dalam administrasi kependudukan yang terindikasi

terjadinya penyelundupan hukum. Apakah tindakannya kembali ke agama Islam setelah pernikahan harus dicatatkan? Hal ini menunjukkan kurangnya panduan operasional dalam menangani situasi semacam ini.

B. Saran

Sehubungan dengan penanganan perkawinan beda agama, pembentuk undang-undang perlu memperhatikan tantangan dalam memediasi antara ketentuan hukum sipil yang mengakui perkawinan tersebut dengan larangan atau aturan agama yang ada. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa regulasi yang ada memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu untuk menikah tanpa diskriminasi berdasarkan agama atau kepercayaan.

Pembentuk undang-undang disarankan untuk melakukan upaya harmonisasi antara ketentuan hukum yang mengakui perkawinan beda agama dengan prinsip-prinsip agama yang dipegang oleh masyarakat. Dengan melakukan harmonisasi ini, diharapkan dapat mengurangi konflik yang berkepanjangan dan Indonesia mempunyai pengaturan hukum secara jelas mengenai perkawinan dengan agama yang berbeda.